

STRATEGI HUMAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM DI ZONA MARITIM TENGAH MANADO

Bahrul Ulum, Antonius Boham, Joanne P.M Tangkudung
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Sam Ratulangi Manado, Jln. Kampus Bahu, 95115, Indonesia
Em@il: ulum42677@gmail.com

ABSTRAK

Strategi humas adalah strategi yang dimiliki oleh seorang humas dalam melaksanakan perannya guna tercapainya tujuan yang diinginkannya. Dalam menyampaikan informasi strategi humas sangat diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Humas Zona Maritim Tengah Manado Dalam Mensosialisasikan Programnya Kepada Masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep, Teori yang digunakan adalah teori Laswell agar komunikasi dapat berjalan lancar dan mempunyai dampak yang baik sesuai yang diinginkan serta konsep humas pemerintahan menurut Erliana Hasan (2005) komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi Bakamla Zona maritim Tengah dalam meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dan patuh akan kebijakan-kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*) dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bakamla Zona Maritim Tengah melaksanakan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat secara langsung dan melalui media online yang dilakukan oleh humas Bakamla Zona Maritim Tengah Manado. Adapun strategi humas Bakamla dengan sasarannya adalah masyarakat umum hanya pada penyampaian berita dan dokumentasi kegiatan dan sosialisasi terkait keamanan dan keselamatan laut melalui media Instagram *bakamla_zona_maritim_tengah* atau melalui website www.bakamla.go.id.

Kata kunci: Strategi, Humas, Bakamla, Sosialisasi Program

ABSTRACT

Public relations strategy is a strategy owned by a public relations officer in carrying out his role in order to achieve the desired goals. In conveying information, public relations strategy is very necessary. The purpose of this study was to determine the Public Relations Strategy of the Manado Central Maritime Zone in Disseminating the Program to the Community. This study uses theories and concepts. The theory used is Laswell's theory so that communication can run smoothly and have a good impact as desired and the concept of government public relations according to Erliana Hasan (2005) Government communication in conveying ideas, programs and government ideas to the public. The benefits of this research are expected to be a valuable input for the Central Maritime Zone Bakamla in increasing its socialization to the public so that people understand and comply with government policies. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out using methods commonly used in qualitative approaches, namely in-depth interviews and observation. The results of the study explained that the Central Maritime Zone Bakamla carried out socialization of government programs to the public directly and through online media carried out by the public relations of the Central Maritime Zone Bakamla Manado. The public relations strategy of Bakamla with the target is the general public only in delivering news and documentation of activities and socialization related to marine security and safety through the Instagram bakamla_zona_maritim_tengah or through the website www.bakamla.go.id.

Keywords: Strategy, Public Relations, Bakamla, Program Socialization

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis kepulauan Indonesia terletak antara 5° 54' 08'' bujur utara hingga 11° 08' 20'' bujur selatan dan 95° 00' 38'' sampai 141° 01' 12'' bujur timur. Pengukuhan Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Ketentuan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 tersebut dapat dimaknai sebagai kedaulatan yang dimiliki negara terhadap wilayah hukumnya untuk menentukan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedaulatan (*sovereignty*) berasal dari bahasa latin yaitu *supranus* yang berarti *supreme* (yang tertinggi). Maka kedaulatan memiliki pengertian sebagai kekuasaan tertinggi dari setiap negara. Ciri dari kedaulatan adalah kelanggengan (*permanence*), sifat tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*), sifatnya sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*), tidak terbatas dan lengkap (*complate*). (Ni'matul Huda, 2015:171). Dalam mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tanggal 8 Desember 2014 dan kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dikarenakan luasnya perairan maritim Indonesia maka kantor Bakamla membagi 3 wilayah Zona Maritim untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya yaitu kantor Bakamla Zona Maritim Barat di Batam, kantor Bakamla Zona Maritim Tengah di Manado dan kantor Bakamla Zona Maritim Timur di Ambon. Bakamla Zona Maritim Tengah Manado yang akan menjadi objek penelitian ini memiliki tanggung jawab terhadap perairan 12 provinsi yang ada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, Serta laut perbatasan Indonesia dengan Filipina ataupun Malaysia. Dalam mengoptimalkan tugasnya Bakamla Zona

Maritim Tengah Manado salah satunya ialah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kelautan kepada masyarakat, Dalam memberikan informasi kepada Masyarakat Humas Zona Maritim Tengah Manado berusaha menyediakan informasi yang teliti dan lengkap tapi dengan kondisi masyarakat pengguna Laut yang banyak di wilayah Zona Maritim Tengah manado dan belum meratanya kegiatan sosialisasi di setiap daerah-daerah yang dilakukan Bakamla Zona Maritim Tengah Manado sehingga masyarakat banyak yang belum paham tentang kebijakan- kebijakan pemerintah, tentunya Bakamla harus mempunyai ide-ide dan program-program untuk mengatasi masalah tersebut. Hal inilah yang menjadi objek penelitian ini yaitu, “Strategi Humas Badan Keamanan Laut Dalam Mensosialisasikan Program Di Zona Maritim Tengah Manado”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang akan diolah adalah data yang berupa informasi program, ataupun hasil wawancara, sehingga data lebih bersifat deskriptif. Selain itu peneliti bermaksud memahami permasalahan ini secara mendalam dan bermakna. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah Interview (wawancara) Metode wawancara dipilih dalam pengambilan data karena peneliti ingin mengetahui informasi lebih mendalam baik dari informan utama maupun informan pendamping. Informasi yang mendalam sangat penting guna menganalisisnya dalam penelitian kualitatif. Lexy J Moleong (2011) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dalam maksud-maksud tertentu. Dalam proses pengumpulan data ini, wawancara mendalam dimana komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah semi terstruktur. Komunikasi dua arah semi terstruktur adalah suatu percakapan yang dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan. Yang kedua dengan cara dokumentasi, dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (Lexy J Moleong, 2007 : 163). Metode ini dilakukan untuk menunjang pengumpulan data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang disebut yaitu yang diperoleh dari literatur, majalah, publikasi, internet, profil lembaga pendidikan, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan atau didapatkan. Dalam penelitian ini, dokumen yang peneliti gunakan antara lain buku tentang strategi humas, program kerja humas Bakamla, dokumen kegiatan Bakamla. Yang ketiga dengan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dalam Pawito (2007), yaitu: 1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. 2. Penyajian data, Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian, bagan, deskripsi hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. 3. Kesimpulan/ verifikasi, Penarikan kesimpulan adalah satu kegiatan konfigurasi yang utuh,

kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinana suatu temua dalam seperangkat data yang lain. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bakamla Zona Maritim Tengah Manado yang beralamat di Jl. Diponegoro No.117, Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara pada rentang bulan April sampai bulan Juni tahun 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk dapat mencakup seluruh perairan Indonesia yang sangat luas, maka dilakukannya Zonasi wilayah operasional Bakamla yang meliputi Bakamla Zona Maritim Barat yang berkantor di Batam, Bakamla Zona Maritim Tengah yang berkantor di Manado, dimana penelitian ini dilakukan, dan Bakamla Zona Maritim Timur yang berkantor di Ambon, dan dengan kantor pusat berada di Jakarta. Pembagian zona tersebut bertujuan untuk pembagian wilayah operasional Bakamla, wilayah operasional Bakamla Zona Maritim Barat pada wilayah perairan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I yang meliputi wilayah perairan provinsi di wilayah barat Indonesia meliputi perairan Sumatra, Bangka Belitung Hingga Perairan Jawa Tengah. Sedangkan wilayah operasional Bakamla Zona Maritim Tengah yang berkantor di Manado dimana tempat penelitian ini dilaksanakan adalah wilayah perairan ALKI II yang meliputi perairan Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sisanya, wilayah perairan ALKI III yakni perairan dan sekita Maluku dan Papua menjadi wilayah operasional Bakamla Zona Maritim Timur. Secara infograsi pembagian wilayah ope Wawancara dengan informasi I yaitu kepala bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla Zona Maritim Tengah Kolonel Bakamla Elly J. Sumampouw, S.H. dilaksanakan pada hari tanggal pukul bertempat di kantor kepala bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama kantor Kamla Zona Maritim Tengah dengan pertanyaan wawancara terkait dengan tugas dan wewenang bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama secara umum, baik di pusat maupun di kantor Kamla Zona Maritim Tengah. Dari hasil penelitian humas Bakamla di Zona Maritim Tengah Manado adalah Humas Bakamla Zona Maritim Tengah, dalam hal ini diperankan oleh bidang Informasi, Hukum dan kerja sama dengan subbidang Informasi dan subbidang kerja sama memiliki tugas dan wewenang sebagaimana umumnya humas, yakni menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam upaya mewujudkan visi misinya. Bakamla sebagai salah satu benteng pertahanan perairan Indonesia tentunya sama dengan Instansi-instansi lain yang bersifat kemasyarakatan, Bakamla banyak memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, informasi yang diberikan kepada masyarakat informasi yang bersifat sosialisasi keamanan dan keselamatan laut serta informasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bakamla. Sehingga informasi yang disampaikan Bakamla bisa sampai kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengetahui tentang program Bakamla Zona Maritim Tengah dan paham akan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peran humas Bakamla lebih besar dilakukan dalam hal kerja sama dan komunikasi serta monitoring terkait keamanan dan keselamatan laut. Kerja sama dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait sangat penting dilakukan demi tercapainya koordinasi dan sinergitas yang baik dalam mengamankan perairan Indonesia. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bakamla antara lain : TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Ham, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Kota/ desa pesisir, Basarnas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain. Bentuk kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dilakukan dalam beberapa hal diantaranya dalam kegiatan latihan bersama, kegiatan patroli keamanan dan keselamatan laut, kegiatan pengintaian dan penindakan terhadap tindakan kejahatan di laut, kegiatan penyelamatan korban kejahatan atau bencana di laut, kegiatan penyaluran bantuan kepada

korban bencana alam bahkan dalam kegiatan pengembangan pariwisata laut. Adapun harapan dari terjalannya kerja sama-kerja sama tersebut adalah terciptanya sinergitas antara Bakamla dan pihak-pihak terkait dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu tercapainya laut Indonesia yang aman. Informasi yang disampaikan oleh Humas Bakamla Zona Maritim Tengah, dalam hal ini adalah Bidang Informasi, hukum dan kerjasama kepada masyarakat berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan Bakamla, sosialisasi program keamanan dan keselamatan laut. Penyampaian informasi tersebut langsung kepada masyarakat secara berhadapan langsung dengan tatap muka dan juga melalui pers, akun instagram resmi Bakamla Zona Maritim Tengah, yaitu bakamla_zona_maritim_tengah, atau melalui website resmi Bakamla di www.bakamla.go.id dengan melalui admin di Bakamla Pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan pada penelitian ini dengan berjudul “Strategi Humas Badan Keamanan Laut Dalam Mensosialisasikan Program Di Zona Maritim Tengah Manado” sebagai berikut: Strategi humas Bakamla Zona Maritim Tengah, Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama, lebih dominan dilakukan dalam hal kerja sama dan komunikasi serta monitoring terkait keamanan dan keselamatan laut. Kerja sama dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait sangat penting dilakukan demi tercapainya koordinasi dan sinergitas yang baik dalam mengamankan perairan Indonesia. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bakamla antara lain: TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Kota/ desa pesisir, Basarnas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain. Adapun strategi humas Bakamla dengan sasarannya adalah masyarakat umum hanya pada penyampaian berita dan dokumentasi kegiatan dan sosialisasi terkait keamanan dan keselamatan laut melalui media Instagram bakamla_zona_maritim_tengah atau melalui website www.bakamla.go.id. Saran dan harapan Program humas Bakamla lebih baik ditambah terkait kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir. Serta harapannya masyarakat dan para pengguna laut khususnya dapat lebih memahami dan melaksanakan pedoman keamanan dan keselamatan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung : Armilo
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia
- Huda, Ni'matul. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Hunger, David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : ANDI
- Komarudin, 2014. *Reformasi Humas Pemerintah*. Jakarta : Genesindo
- Moleong, J, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pelangi Aksara Yogyakarta
- Riyanto, Sigit. 2012. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia Volume 1 Nomor 3.

- Rosady, Ruslan. 2007. *Manajemen Publik Relations dan media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Samsul Munir, Amin. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, Jakarta : Amzah
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2021, <https://kbbi.web.id/>
- _____ 2021, <https://id.wikipedia.org>
- _____ 2021, <https://www.bakamla.go.id>
- _____ 2021, https://www.instagram.com/bakamla_zona_maritim_tengah